

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kota Makassar)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

IRFAN

NIM: 10200114015

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irfan
Nim : 1020114015
Tempat/Tgl. Lahir : Gareccing, 22 Juli 1996
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Penyelesaian
Penyidikann Oleh Penyidik Dalam
Tindak Pidana Narkotika Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Kota
Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar bahwa hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, Januari 2019

Penyusun

Irfan
NIM: 10200114015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penyidikan oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Makassar)**" yang disusun oleh saudara **IRFAN, NIM: 10200114015**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanganan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 28 Februari 2019 M

22 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H., M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Kurniati, M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIM 19621016 199003 1 003



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, tak lupa pula shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta para Sahabatnya sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penyidikan Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Makassar)”, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, kepada Ayahanda Suddin dan Ibunda Sufiati, yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudara Supriadi yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
3. Dra Nila Sastrawati M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaran dan Dra Kurniati M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
4. Dr. Hamzah Hasan M.H,I selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Halimah B, M.Ag selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses pembimbingan sampai selesainya pembimbingan skripsi
5. Pihak POLRESTABES Kota Makassar yang telah bersedia memeberikan informasi kepada penulis dan membantu selama proses penelitian
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat selama perkuliahan serta para Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis
7. Segenap keluarga dan teman teman yang telah membantu dan menyemangati penulis selama penyelesaian skripsi ini
8. Kepada Ayu Nurvita Jerana, S.H yang telah memberikan dukungan dan semangat selama ini.
9. Teman-teman angkatan HPK, terkhusus HPK A 2014 yang telah menyemangati dan memberikan warna selama perkuliahan.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana islam.

Makassar, 27 Januari 2019

Penulis

IRFAN

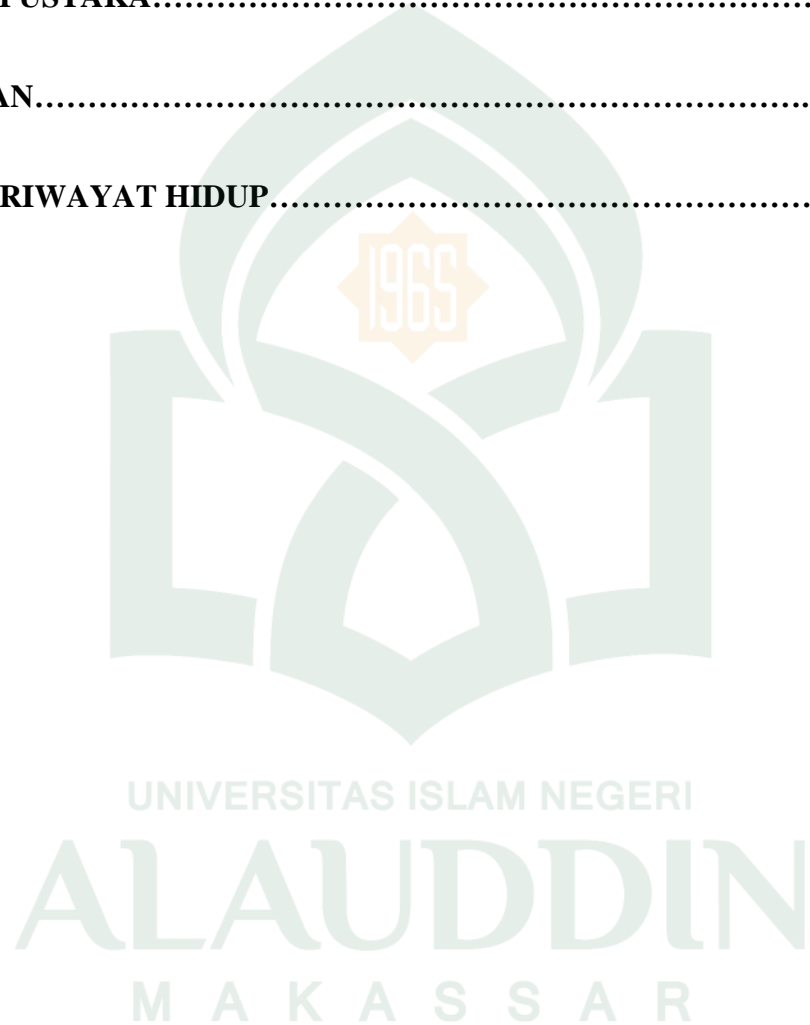


DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	15-40
A. Pengertian Penyidik dan penyidikan.....	15
1. Syarat-syarat Penyidik.....	17
2. Tugas dan Fungsi Penyidik.....	21
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	24
1. Pengertian Narkotika.....	24
2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	25

	3. Jenis-jenis Narkotika.....	26
	4. Peraturan Tentang Narkotika dalam Hukum Nasional.....	27
	C. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	29
	D. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	32
	E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam.....	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	41-44
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
	B. Pendekatan Penelitian.....	41
	C. Sumber Data.....	41
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	E. Instrumen Penelitian.....	43
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
BAB IV	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	45-70
	A. Gambaran Umum Polresta Makassar	45
	B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kota Makassar.....	48
	C. Faktor-faktor Yang Menghambat Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Kota Makassar.....	61
	D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika ...	63

BAB V	PENUTUP.....	71-72
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73-74
LAMPIRAN.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قَتَلَ: *qīla*

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu“ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika iadiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمُورٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang dididahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Irfan
Nim : 10200114015
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Tinauan Yuridis Penyelesaian Penyidikan Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Makassar)

Pokok permasalahan penelitian ini adalah :“bagaimana analisis yuridis penyelesaian penyidikan oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika perspektif hukum Islam”. Dan dapat diuraikan sub masalah sebagai berikut : (1) bagaimana pelaksanaan penyidik tindak pidana narkotika di kota Makassar (2) Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika (3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif atau penelitian dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Sumber data primer yaitu wawancara, interview, dan data sekunder yaitu buku, jurnal, hasil penelitian.. Metode pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi pustaka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidik tindak pidana narkotika di Kota Makassar adalah proses penyidikan pada tindak pidana biasanya dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan tindak pidana narkotika maka korban narkotika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkotika adalah juga pelaku tindak pidana narkotika. Faktor-faktor yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika antara lain; (a) Masyarakat takut melaporkan mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di wilayahnya karena takut berurusan dengan aparat kepolisian; (b) Kurangnya fasilitas yang mendukung dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, (QS al-Maidah/5:90) dan Hadis Rasulullah saw. Penggunanya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagang nya harus dijatuhi hukuman ta’zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati.

Implikasi dari penelitian adalah hendaklah pihak kepolisian meningkatkan kinerja khususnya dalam mengungkapkan dan memberantas tindak pidana narkotika di Kota Makassar; Pihak kepolisian hendaknya melakukan sosialisasi dampak dan bahaya narkoba bagi masyarakat; Kepolisian dihimbau memberlakukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan hukuman hukum Islam yaitu dengan hukum Had (dicambuk).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu di atur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang bermakna dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur agar merata secara spiritual maupun materiil berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk salah satu diantaranya ialah peningkatan derajat kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, dan juga digunakan untuk percobaan dalam penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

¹Undang-undang dasar 1945 dan perubahannya struktur ketatanegaraan, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011), h.5.

Dalam era globalisasi pada saat ini, masyarakat terus menerus berkembang, di mana perkembangan tersebut melaju mengikuti proses penyesuaian diri yang kadang mencerminkan proses yang tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma aturan sering terjadi dikalangan masyarakat dan kejahatanpun semakin merajalela. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat diperhadapkan pada ilmu pengetahuan dan pola pikir yang kian melaju pesat. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan disegala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya, dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.²

Bahaya narkoba sekarang semakin memprihatinkan, pemakai Narkoba bukan hanya orang yang sering keluar negeri atau orang yang sering memasuki tempat hiburan malam. Akan tetapi juga terhadap pelajar, mahasiswa, olahragawan, maupun pejabat negara. Terlebih lagi akhir-akhir ini banyak remaja kedapatan sedang memakai narkoba ataupun mengedarkan narkoba. Bahkan, banyak para pejabat Negara yang sudah memakai narkoba seperti pejabat kepolisian maupun pejabat-pejabat Hukum lainnya, yang seharusnya merekalah yang memerangi, menangkap peredaran narkoba, dan menjadi panutan dan contoh bagi warga lainnya. Untuk itu telah lama di rilis kerja sama internasional untuk memberantas penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika. Tetapi tampaknya, tidak mudah untuk wujudkan kerena sampai saat ini masih banyak

²J.E Sehetapy, *Teori Kriminologi suatu pengantar*. (Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung 1992), h. 172.

penyalahguna narkoba yang masih berkeliaran, dan banyak yang menjadikannya sebagai lahan bisnis bahkan mengalahkan reputasi bisnis yang lainnya.

Dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba, orang-orang yang sering terjerumus pada perbuatan tersebut ialah para remaja. Mereka mempunyai karakter tersendiri, masih labil, dan rentan terbawa arus. Oleh karena itu dalam hal ini. Keluarga mempunyai peran penting untuk menghindari tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba karena keluarga yang sangat berpengaruh dalam mendidik anak-anaknya.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana Narkoba telah bersifat internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.³

³Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: PT. Ba;lebat Dedikasi Prima, 2016), h. 120.

Oleh karena itu, larangan terhadap penggunaan narkoba tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi di dalam Islam pun demikian. Hal itu di jelaskan dalam QS Al-A'raf/7:157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلْطِيبَتٌ لِّهِمْ وَالْحَنَفَاءُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُهُمْ نَارَ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁴

Lebih jelasnya, pada potongan ayat di atas yaitu pada kalimat *Wa Yuharrimu Alaihim Al Khobaitis*, yang artinya dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi sangat jelas sekali bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah swt.

Berdasarkan uraian ayat di atas narkoba merupakan barang yang buruk dan termasuk kategori barang buruk yang diharamkan Allah swt. Narkoba memang termasuk permasalahan baru di dalam Islam. Secara tekstual memang tidak terdapat ayat atau hadis yang secara langsung mengharamkan narkoba.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h.135.

Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap yang haram dan dilarang meski ada tekstualnya di dalam al-Qur'an atau hadis. Terkadang al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan dalil umumnya saja. Sebagai contoh: Islam mengharamkan memukul dan menganiaya kedua orang tua. Padahal dalil secara tekstual tentang memukul dan menganiaya kedua orang tua tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Yang diharamkan Allah di dalam al-Qur'an adalah berkata "ah" atau yang semaknanya. Meski demikian cara memahami ayat yang benar adalah jika berkata "ah/uh" saja tidak boleh, tentu yang lebih besar dari perkataan itu seperti memukul, menganiaya, menelantarkan orang tua jauh lebih diharamkan meskipun tidak terdapat nash nya langsung dalam al-Qur'an.⁵

Begitu juga dengan masalah narkoba, narkoba membuat manusia mabuk seperti mengonsumsi minuman keras. Bahkan efek mabuk dan *fly* yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat dari pada miras. Berarti ada sisi kemiripan alasan dalam mengharamkan narkoba dan miras. Yaitu kedua-duanya (narkoba dan miras) sama-sama memabukkan, memacu kejahatan dan merusak jasmani dan rohani. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa narkoba hukumnya haram sebagaimana miras.⁶

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat internasional yang di lakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di

⁵Anas Abdillah, *Hidayah sunnah*, "Hukum Narkoba", <http://anacilacap.blogspot.com/2014/08/hukum-narkoba.html> (Diakses 17 agustus 2014).

⁶Anas Abdillah, *Hidayah sunnah*, "Hukum Narkoba", <http://anacilacap.blogspot.com/2014/08/hukum-narkoba.html> (Diakses 17 Agustus 2014).

antara aparat penegak hukum yang memiliki peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Polri”.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu alat Negara penegak hukum. Faktor manusia adalah dominan sebagai sosok yang dipilih dan disaring dari masyarakat dalam suatu wadah yang harus bertanggungjawab demi tegaknya hukum. Tugas anggota polisi diseluruh dunia adalah sama yakni menegakkan hukum, melindungi jiwa manusia dan harta benda.⁷

Dan lebih khusus yang menangani hal tersebut dalam bidang kepolisian adalah penyidik dan penyelidik yang dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 1981 KUHAP, pasal 106 yang berbunyi :

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan dan/atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.⁸

Penyidik memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar suatu tindak pidana dapat diketahui kasusnya dengan jelas serta proses menemukan dan menentukan pelakunya.

⁷Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku* (Jakarta: Polri, 2001), h. 1.

⁸Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: SinarGrafika, 2011), h.241.

Tujuan penyidikan menurut Gerson W.Bawengan adalah untuk mengetahui siapa yang melakukan kejahatan dan mencari pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sesuai dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan dimaksud biasanya mengenai:

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
- b. Identitas si korban
- c. Tempat dimana kejahatan itu dilakukan
- d. Bagaimana terjadinya kejahatan.
- e. Apa yang menjadi motifnya.⁹

Allah berfirman dalam QS Al Nisa/4 : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁰

Dalam surah Al-Nisa/4: 58 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan

⁹Gerson W.Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h.11.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

(menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada kalian.¹¹

Tindakan kriminal seperti narkoba sudah menjadi kejahatan yang tidak lazim lagi sehingga para penegak hukum berupaya penuh dalam memberantas hal tersebut namun, karena maraknya tindakan tersebut sehingga mempersulit dalam pelaksanaannya. Pengonsumsi narkoba sudah sangat banyak bersebaran dimana-mana seperti contohnya di Negara kita Indonesia.

Pengguna narkoba di Indonesia tersebar di beberapa wilayah seperti salah satunya ialah Sulawesi Selatan yang menjadi urutan ke 9 pengguna Narkoba di Indonesia. Khususnya di kota Makassar sebagai sentral kota di Sulawesi Selatan yang dimana pergaulan dan pengaruh dari penggunaan Narkoba yang tersebar dengan begitu mudah.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan menilai pengguna narkoba di Sulawesi Selatan terutama di Makassar masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna atau pemakai narkoba yang mendapatkan pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Menurut kepala bidang rehabilitasi BNN Sul-Sel Sudaryanto mengakui penggunaan narkoba paling banyak adalah kalangan remaja usia 15 sampai 25 tahun. Jumlah itu dibuktikan dengan data penggunaan yang mengikuti rehabilitasi pada tahun 2016, yaitu terbanyak pada kelompok remaja akhir (umur 17-25 th) sebanyak 44,27% dewasa awal (umur 26-35 th) sebesar 25,74%, kemudian disusul dewasa akhir (umur 36-45) sebanyak 14,07%. Sementara remaja awal (umur 12-16 th) sebanyak 12,87%

¹¹Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (juz 5 : Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), h. 253.

lansia awal (umur 46-55 th) sebanyak 2,18% lansia akhir (usia 56-65 th) sebanyak 0,54% serta anak-anak (usia 5-11 th) sebanyak 0,33%.¹²

Penggunaan Narkotika di daerah Makassar masih ternilai menjadi pengguna tertinggi disebabkan karena beberapa kondisi diantaranya, masyarakat masih enggan dalam menerima informasi berupa edukasi bahaya Narkotika, penyebaran begitu massif dan kondisi finance dimana perdagangan Narkotika memberikan keuntungan yang lebih bagi para penyebar Narkotika.¹³

Gejala-gejala tersebut kemudian menjadi kekhawatiran Publik akan potensi bertambahnya pengguna narkotika. Sehingga dari uraian-uraian diatas dianggap perlu dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Penyidikan Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Makassar).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Tinjauan Yuridis
- b. Penyidikan
- c. penyidik
- d. Tindak Pidana
- e. Narkotika
- f. Hukum Islam

¹²Hasan Basri. *Tribun Timur, Pemakai Narkoba di Makassar didominasi Kalangan Remaja BNN minta lapor sebelum ditangkap*. <https://Makassar.tribunnews.com/2017/02/12/pemakai-narkoba-di-makassar-didominasi-kalangan-remaja-bnn-minta-segera-lapor-sebelum-ditangkap>. (Diakses 12 februari 2017).

¹³Bripka Adi Jaya (31 tahun), Ba sub bagian hukum, *wawancara*, 1 Oktober 2018.

2. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian	Deskripsi focus
1. Tinjauan yuridis	tinjauan yuridis adalah memepelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, memepelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berate mennurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjaua yuridis berarti memepelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), sauatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Penyidik	Menurut pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan	Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam

	Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
4. Tindak Pidana	Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
5. Narkotika	Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).
6. Hukum Islam	Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk

	semua umat yang beragama Islam.
--	---------------------------------

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Analisis Penyelesaian Penyidikan Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika”.

Dari pokok masalah tersebut, dapat diuraikan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidik tindak pidana narkotika di kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah dalam rencana penelitian ini, Peneliti menggunakan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi ndengan rencana penelitian. Adapun kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

Hamzah Hasan, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam 1*, tahun 2014. Dalam buku ini menjelaskan mengenai gambaran Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada umumnya. Dalam buku ini menggambarkan mengenai larangan untuk mengonsumsi Narkoba, karena para pelaku yang terlibat menyalahgunakan narkotika disamping dirinya sebagai korban juga menjadi objek dari hukum. Disamping itu juga, pelaku menderita secara pribadi yang dapat merusak masa depan serta berakibat pada kesehatan dan mental yang kadang-kadang menyebabkan kematian bila pemakainya overdosis. Sedangkan dalam skripsi ini

akan membahas mengenai proses penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi dimakassar serta factor yang menjadi hambatan para penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika.

Suharsil, dalam bukunya *Tindak Pidana Narkotika*, tahun 2003. Dalam bukunya membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku atau penggunaan narkoba dengan sebuah hukuman atau suatu efek jerah sehingga seseorang tidak akan lagi mengulangi perbuatannya lagi. Dalam buku tersebut lebih menitik beratkan pada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan UU yang berlaku sedangkan dalam skripsi ini fokus utamanya tentang pelaksanaan penyidik tindak pidana narkotika serta padangan hukum islam terhadap penggunaan narkotika.

Laden Marpaung, dalam bukunya yang berjudul *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, tahun 2009. Buku ini secara khusus membahas proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika, akan tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tentang narkotika akan tetapi hanya menjmlaskan proses penyelidikan dan penyidikan secara umum mengenai suatu tindak pidana. Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas mengenai proses penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi dimakassar serta faktor yang menjadi hambatan para penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika.

Nikolas Simanjuntak dalam bukunya *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, buku ini lebih banyak membahas tetang penyelidikan dan penyidikan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai proses penyelesaian kasusnya, selain itu buku ini juga membahas mengenai siapa yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta makna dan tujuan

dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu tindak pidana. Dalam buku tersebut lebih menjelaskan tentang siapa yang berhak melakukan penyidikan sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba dan faktor yang menjadi hambatan penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

Moh. Taufik Makaro dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Narkoba*, dalam buku tersebut dibahas dimulai dari masalah narkoba hingga poses penerapan Undang-Undang narkoba dan proses hukum dalam tindak pidana narkoba. Sedangkan skripsi ini membahas tentang penyidikan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan penyelesaian tindak pidana narkoba di Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkoba.

2. Kegunaan

Menguraikan serta menjadi pokok penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis penyelesaian penyidikan oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba” sehingga dapat berguna untuk memberikan informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan¹.

Adapun fungsi dan kewenangan penyidik adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

¹R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), h.359.

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a).²

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.³ Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk :

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.”⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :

- a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
- b. Identitas daripada si korban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Waktu terjadinya kejahatan; Motif, tujuan, serta niat
- e. Identitas pelaku kejahatan.⁵

Tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari,

²KUHP dan KUHPA, h.366.

³KUHP dan KUHPA, h.359.

⁴Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara pidana* (Jakarta: Paradnya Paramita, 2002), h. 18.

⁵Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara pidana* .(Jakarta: Paradnya Paramita, 2002), h. 25.

masyarakat seringkali melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya mengenai tindak pidana.⁶

1. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu di selaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Inspektur Polisi Dua (IPDA), sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas POLRI sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaannya wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di

⁶Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Seni-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 85.

Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan, dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP Junto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No. 27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 / 1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasan pasal 17 PP No. 27 /1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh perwira Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan UU. Tetapi khusus untuk pelanggaran ZEE sesuai dengan UU No. 5/1983 penyidikan hanya dilakukan oleh Angkatan Laut Republik. Penyidikan terhadap ZEE tersebut diberikan khusus secara mandiri kepada Angkatan Laut Republik Indonesia disebabkan Batas wilayah Republik Indonesia hanya 12 Mil saja sedangkan ZEE meliputi 200 Mil. Wajarlah dengan peralatan yang memadai, penyidikan hanya diberikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan

tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang – undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemedanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Menuntut umum pun tak mampu menuntut, manakalah polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena pemeriksaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan.⁷

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan di sebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilator belakang pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tehnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam hukum acara pidana untuk memperbaiki tehnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidik bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasa beberapa

⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 127.

pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.⁸

Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.

Dengan terbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi dan mengindividualisasi dan mengevaluasi bukti fisik.⁹

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti: ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi, pengetahuan tentang luka, daktiloskopi (sidik jari), jejak kaki, antropometri, dan antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran material bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiater yg disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

⁸Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 153.

⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 162.

Dari uraian di tersebut,tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses pidana karena penyidiklah yg akan berperan di garis depan dalam pelaksanaan penegak hukum. Namun demikian, tugas berat yg di pikul tersebut bila di jalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

2. Tugas dan Fungsi Penyidik

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁰ Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;menyuruh berhenti seorang tersangka;melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;mendatangkan seorang ahli yg di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;mengadakan perhentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yg bertanggung jawab.¹¹

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan,penahanan,penggeledahan,pemasukan rumah,penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan,dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yg di kuatkan dengan sumpah jabatan dan di tanda tangani oleh penyidik dan semua orang yg terlibat.(pasal 8 jo 75 KUHAP)

Setiap pejabat polisi adalah penyidik yg karena kewajibanya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yg di curigai atau dan

¹⁰*KUHAP dan KUHAP*, h. 359.

¹¹*KUHAP dan KUHAP*, h. 364.

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yg di curigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (pasal 4-5 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama Polri dari pangkat prada sampai jenderal dalam rangka mencari kejahatan yg terjadi dalam masyarakat.

Menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 syarat kepangkatan pejabat polisi Republik Indonesia yg di beri wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang kurangnya yg berpangkat inspektur polisi Dua (IPDA). Sedangkan menurut jika di suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat inspektur polisi dua maka komandan sektor kepolisian Republik Indonesia yg berpangkat bintara di bawah pembantu inspektur polisi dua karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi tersebut diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia, yg dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh menteri kehakiman atau usul departemen yg membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yg dimaksudkan misalnya instansi-instansi:

- a. Bea cukai
- b. Badan Geofisika dan Meterologi
- c. Pegawai imigrasi
- d. Angkatan laut dan lain-lainya

Selanjutnya pasal 3 PP No.27 tahun 1983 penyidik pembantu adalah pejabat polisi republic Indonesia yg berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yg berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 UU No.2 Tahun 2002. pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yg masih aktif (butir 3 dari pasal 1 UU No.2 Tahun 2002).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (pasal 2 UU No.2 Tahun 2002). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia pasal 3 UU No.2 Tahun 2002).

Menurut pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas dari kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yg dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yg dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam ruang lingkup kewenangan administrative kepolisian

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan baerang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan /atau surat keterangan yg diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang atau pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk smentara waktu

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari kata *Narcoticum* yang berarti obat bius.¹² Secara umum narkotika adalah bagian dari Narkoba. Yang mana Narkoba adalah singkatan dari “Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang disalahgunakan” kata “yang disalahgunakan” memberikan pengertian bahwa narkoba itu tidak selalu berkonotasi negatif.¹³

Dengan begitu, Narkotika dan Psikotropika yang baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk Narkoba, yang diberi nama narkoba hanya yang disalahgunakan.¹⁴ Berikut beberapa pengertian tentang Narkotika yaitu:

¹²As’ad Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi* (Jakarta: Kurnia Esa, 1995), h. 309.

¹³Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h.10.

¹⁴Subagyo Parthodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, h. 11.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁵

Menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Dalam kamus besar bahasa indonesia narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, mengantuk, atau merangsang seperti opium dan ganja.¹⁶

Menurut Biro Bea Dan Cukai Amerika Serikat (*National Indertification Manual*) Bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokai, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morfin, heroin, codeinhasich, cocain dan termasuk juga narkotika yang tergolong dalam hallucgniaztion¹⁷

2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Para pelaku yang terlibat menyalahgunakan narkotika disamping dirinya sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum, walaupun pelaku menderita secara pribadi yang dapat merusak masa depan juga berakibat pada kesehatan dan mental yang kadang-kadang menyebabkan kematian bila pemakainya overdosis. Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal dan susunan saraf, paru-paru.

Karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar, selain itu

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁷Biro Bea Dan Cukai Amerika Serikat (*National Indertification Manual*), (06 Januari 2018).

dampak buruk yang juga dialami oleh pribadi seseorang apabila menyalahgunakan Narkotika adalah:

- a. Menjadi pemurung , pemaarah, melawan terhadap siapapun
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun untuk dirinya sendiri, seperti tidak memperhatikan sekolah, rumah pakaian tempat tidur dan sebagainya
- c. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu saat menjadi seperti orang gila
- d. Tidak ragu mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangan terhadap norma-norma masyarakat, hukum agama sudah demikian rapuh
- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat keterantungan obat bius
- f. Menjadi pemalas bahkan hidup dengan santai.¹⁸

Dari penjelasan tersebut maka tidak ada satupun dampak baik dari penggunaan Narkotika secara berlebihan. Narkotika hanya merusak masa depan setiap generasi bangsa. Oleh karena itu hendaknya sebagai warga negara yang baik kita harus menghindarkan diri dari Narkotika dan sejenisnya.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009, jenis narkotika dibedakan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan

¹⁸Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Pers, 2014), h. 87.

apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah kodein dan turunannya¹⁹

Menurut Dr. Subagyo Parthodihardjo Direktur Lembaga Kesehatan Preventif Sekaligus Ketua Umum Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkoba, didalam bukunya yang berjudul “ Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya” menjelaskan 3 (tiga) jenis narkotika yaitu:

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) contohnya Ganja, Hasis, Koka, Opium.

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran contohnya, Morfin, Kodein, Heroin, Kokain.

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan. Contohnya Petidin, Methadone, Naltrexone.²⁰

4. Peraturan Tentang Narkotika dalam Hukum Nasional

Karena sebagian dari narkotika bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga, membawa

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*, Pasal 2.

²⁰Subagyo Parthodihardjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.12.

malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaanya harus diatur dalam undang-undang negara. Mengenai penyalahan narkoba diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.²¹ Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain.

Berikut akan dijelaskan beberapa ketentuan pidana tentang narkoba.

Pasal 111 ayat (I), Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00, (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1), Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00, (delapan miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (2), Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 114 ayat (1), Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00, (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 115 ayat (1) ,Setiap orang berhak tanpa hak atau melawan membawa hukum membawa, mengirim, mengangkut atau meransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000.00, (delapan ratus miliar rupiah).

Pasal 116 ayat (1), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00,

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat didalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan, seperti berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut :

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika baik golongan I, II dan III. Diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

a. Pasal 113 ayat (1)

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

b. Pasal 118 ayat (1)

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

c. Pasal 123 ayat (1)

1. Setiap orangTanpa
2. hak atau melawan hukum
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II

4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika baik Golongan I, II dan III diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

- d. Pasal 114 ayat (1)
 1. Setiap orang
 2. Tanpa hak atau melawan hukum
 3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :
 4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 119 ayat (1)
 1. Setiap orang
 2. Tanpa hak atau melawan hukum
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;
 4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- f. Pasal 124 ayat (1)

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Sedangkan yang mengatur tentang narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 111 sampai pasal 148 BAB XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

D. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologis narkotika diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhādirāt* yang berasal dari kata *khaddar-yukhaddirun-takhdīrān* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.²² Kata *al-Mukhādirāt* dapat juga diambil dari arti kata kemalasan dan kelemahan. Dalam artian seseorang yang menggunakan Narkotika akan berubah menjadi pemalas dan menjadi lemah dikarenakan tidak mampu beraktivitas seperti orang normal yang disebabkan oleh pengaruh dari Narkotika itu sendiri.

Walaupun narkotika termasuk kategori *khamar*, tetapi bahannya lebih berat dibandingkan dengan *khamar* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Al-Sabiq yang menyatakan “sesungguhnya ganja itu haram”. Diberikan sanksi *had* bagi orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi *had* peminum *khamar*. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamar*. Ditinjau dari

²²M.Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 177.

sifatnya, gana dapat merusak akal sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh buruk lainnya.²³

Istilah narkotika dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gambling dalam Al-Qur'an dan Sunah. Keduanya hanya menyebutkan Khamar. Meskipun demikian, hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui metode qiyas, metode yang juga digunakan untuk ketentuan remisi.

Minuman keras yang menyebabkan mabuk dalam Al-Qur'an disebut dengan "*khamar*" yang berasal dari kata "*khamara*" yang berarti menutupi sesuatu. Jadi kata khamar berarti setiap atau sari buah yang diragikan dari buah anggur, kurma, madu ataupun yang lainnya, yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata khamar boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.²⁴

Mengenai Narkotika dalam hal ini adalah berupa barang yang dapat membuat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵ Maka antara khamar dan Narkotika terdapat persamaan yaitu sama-sama memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Di dalam Islam seseorang yang sedang dalam keadaan mabuk atau kehilangan kesadaran dilarang melaksanakan shalat.

Di dalam syariat Islam mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya di haramkan. Adapun proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebanyak 4 kali.

Tahap pertama Allah swt, menurunkan ayat khamr yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya

²³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 224.

²⁴Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Pers, 2014), h.85.

²⁵Subagyo Parthodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.25.

dimasyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah QS Al-Nahl/ 16: 67 sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan²⁶.

Tahap kedua, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai khamr. Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.²⁷

Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat diatas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh sisi manfaat dan mudharat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum khamr masih tetap berlangsung; tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h. 274.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

Tahap ketiga, diturunkan ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamr. Allah swt berfirman dalam QS Al-Nisa/4:43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ الْبِئْسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.²⁸

Adapun sebab turunnya dari ayat di atas berdasarkan riwayat Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim meriwayatkan dari Ali ra., dia berkata: “Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan khamar sebagai minumannya. Akupun meminum khamar itu. Lalu tiba waktu sholat dan orang-orang menyuruhku menjadi imam. Saat menjadi imam, aku membaca: ‘*Qul ya ayyuhal kafiruu*’ dan banyak yang salah baca, maka Allah swt. Menurunkan ayat 43 ini.²⁹

Mengenai proses pengharaman khamr ini; Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh As-Shabuni; Umar bin Khattab berdoa kepada Allah agar hukum tentang Khamr di pertegas.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

²⁹Lihat Imam As-Suyuti, *Asbab An-Nuzul* (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 528-529.

Tahap keempat, diturunkannya 1 ayat terakhir mengharamkan khamr. Ayat ini sekaligus menjadi jawaban dari doa Umar bin Khattab. Dalam QS Al-Maidah/5:90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁰

Demikianlah diantara bukti kongkrit bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah dengan *tadarruj*, proses menyelesaikan kondisi tempat dan budaya masyarakatnya.³¹

E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yaitu:

- a. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
- b. *Hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa)
- c. *Hifzh al-āqli* (memelihara akal pikiran)
- d. *Hifzh al-nashli* (memelihara keturunan)
- e. *Hifzh al-mal* (memelihara harta)³²

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h . 43

³¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Cet. 3; Jakarta: Amzah, 2015), h. 48-50

³²Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 107.

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan haqiqi hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini akhirat kelak.

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

b. Memelihara Jiwa

untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir panjang katrena apabila orang yang dibunuh itu mati maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh tidak mati tetap hanya cedera maka si pelakunya juga akan di cederai.

c. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah swt, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik di bandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Aka tetapi bentuk yang indah itu tdk ada gunanya kalau tidak ada hal yan kedua, yaitu akal.

e. Memelihara Keturunan

perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakkan dn syarat apa yan harus dipenuhi, sehinggah perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya.

f. Memelihara Harta Benda

Islam menyakini bahwa semua harta didunia adalah milik Alla Swt, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antar satu sam lain.³³

Syariah telah menetapkan pemenuhan kemauan dan perlindungan terhadap sasaran pokok tersebut dengan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal pokok tersebut. mengingat ketidakseimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh Narkotika pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada satu sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukanya.

Narkotika dengan berbagai jenis, bentuk, dan nama yang telah diidentifikasi pengaruhnya terhadap akal pikiran dan fisik, maka sanksi hukumanya dikategorikan dalam *khamar*, yang secara tegas dan keras dilarang

³³ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Maqasyhid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)”, *Majelis Ukhwah Penulis Bersyariah*, (di akses 21 September 2013).

oleh Allah SWT dan Rasul-Nya³⁴. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa narkoba tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan sunah. Akan tetapi keduanya menyebutkan khamar. Adapun hikmah diharamkannya khamar adalah karena zat tersebut merupakan induk kejahatan karena dapat mendorong si peminum melakukan tindak kejahatan lainnya. Meskipun narkoba tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan zat itu hukumnya haram karena dapat merusak jasmani dan rohani, bahkan jauh melebihi khamar.

a. Sanksi Hukum Hudud

Sanksi hukum ini seperti sanksi peminum khamar. Mengenai hal ini IbnuTaimiyyah berpendapat, "sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar." Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain yang mengatakan bahwa "sanksi hudud juga dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar."³⁵

b. Sanksi Hukum Tā'zir

Pendapat ini adalah pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hashari. Argumentasi mereka adalah:

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW
2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar
3. Narkoba tidak diminum seperti halnya dengan khamr, dan
4. Jenis narkoba sangat banyak.

³⁴Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*: Sebuah Studi Perbandingan (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2013) 06 Januari 2018

³⁵M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 228.

Adapun sunah tidak menjelaskan sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu sanksi hukum bagi mereka adalah tākzir. Sementara itu, Majelis Ulama berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah tākzir. Disisi lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan-tindakan seperti;

1. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi penjual, produsen dan penyelundup bahan-bahan narkoba
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen dan pengedar narkoba
3. Mengeluarkan aturan agar orang-orang yang mempunyai legalitas untuk menjual narkoba agar tidak menyalahgunakanya.³⁶



³⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 229

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bersifat deskriptif kualitatif atau penelitian dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar unit Narkoba dengan alasan bahwa lokasi ini mendukung untuk dijadikan lokasi penelitian.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normative* yaitu suatu penelitian secara deduktif, mulai dari analisis, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap suatu masalah. Dan pendekatan *syar'i* yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syari'at Islam seperti al-Qur'an dan Hadis.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data primer

Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui dokumen resmi maupun tidak resmi, laporan dalam bentuk dokumen, wawancara dan observasi yang nantinya diteliti oleh peneliti¹. Hasil wawancara dengan para pihak kepolisian Polrestabes Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian baik

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang-undangan.

Adapun data sekunder yang berhubungan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku yang membahas tentang Narkotika, Penyidikan, hokum pidana serta buku-buku FIQH ;
- b. Hasil- hasil penelitian terdahulu baik berupa skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana narkotika baik secara umum maupun dalam perspektif Islam.
- c. Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan narkotika.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, yang mana metode yang akan digunakan adalah:

Observasi: Sebelum melakukan penelitian maka terlebih dahulu peneliti akan mengamati secara langsung tempat yang akan ditempati oleh peneliti untuk meneliti dan melakukan wawancara. Observasi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Polrestabes Makassar.

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab yang disebut percakapan secara lisan yang saling berhadap-hadapan secara langsung antara dua orang atau lebih yang diarahkan kepada suatu permasalahan tertentu². Maka dari itu, seluruh jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara yang dilakukan oleh informan antara lain: Bapak Aiptu Lili Sugianto selaku kepala sataun unit 3 narkoba Polrestabes Makassar, Bapak Bripka Adi Jaya Ba Sub Bagian Hukum, Aiptu Muhlis bagian unit 3 satuan narkoba polrestabes Makassar.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

Dokumentasi adalah suatu proses catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang³. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah hasil selama proses wawancara dan observasi yang digunakan sebagai bukti yang sah kepada kebenaran sebuah data.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti sendiri, Peneliti berperan secara langsung dalam proses penelitian mulai dari mendekati topik, mengumpulkan data, menganalisis hingga menginterpretasikannya tanpa diwakilkan oleh pihak lain, sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mampu mengemukakan data yang akurat dan terpercaya.

Pedoman wawancara diperlukan dalam melaksanakan penelitian wawancara, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sehingga peneliti dapat menjawab setiap rumusan masalah yang akan disimpulkan. Pedoman ini membantu peneliti agar pertanyaan-pertanyaan peneliti singkat padat dan jelas sehingga informan mengerti maksud dan tujuan dari penelitian tersebut.

Telephone genggam (hp), penggunaan alat ini dalam penelitian adalah sebagai penunjang dalam kelan caran penelitian yakni sebagai alat perekam baik berupa suara atau gambar untuk merekam hasil dari wawancara dengan narasumber.

Laptop, penggunaan alat ini adalah untuk mengolah serta menyimpan semua hasil wawancara dan analisis dari literatur-literatur terkait yang digunakan untuk pengembangan hasil penelitian.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 107.

F. Teknik Pengolahan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. Pengolahan data yaitu kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan yang diperoleh melalui proses wawancara, sehingga data tersebut dapat dianalisis. Adapun termasuk dalam teknik pengolahan data yaitu : Seleksi Data, yaitu menyaring data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang selanjutnya akan dibahas.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasannya.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data-data menurut pokok bahasanya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu menyusun data menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat perlu ketelitian dalam penelitian. Setelah pengolahan data, memilah-milah data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya menganalisis data dengan menjabarkan secara terperinci keadaan suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran garis besar yang kemudian dimasukkan dalam pembahasan guna memberi kesimpulan.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK

A. Gambaran Umum polrestabes Makassar

Polrestabes Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam Jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsek), yaitu:

1. Polsek Tallo.
2. Polsek Makassar.
3. Polsek Ujung Pandang.
4. Polsek Bontoala.
5. Polsek Mariso.
6. Polsek Mamajang.
7. Polsek Tamalate.
8. Polsek Rappocini.
9. Polsek Biringkanaya.
10. Polsek Tamalanrea.
11. Polsek Panakukang.
12. Polsek Manggala.

Tugas Porestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserch criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
3. Pemberian dukungan (back up) operasional kepada Polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
4. Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.

5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya.
6. Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas atensi Kapolda.
7. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda.

B. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di kota Makassar

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri tidak lagi dikatakan barang terlarang yang susah didapatkan, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkotika menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang di alami yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan.

Aiptu Lili Sugianto, sebagai subag unit 3 narkoba Polrestabes Makassar, mengungkapkan bahwa :

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini sudah marak, bukan hanya di kota-kota, akan tetapi peredarannya dan penyalahgunaannya sudah masuk ke pelosok pedesaan, upaya penanganan kasus narkotika ditingkat polrestabes bilamana ada kasus narkotika hanya dilakukan penanganan awal termasuk membuat laporan polisi kemudian selanjutnya serahkan kepenyidik Satuan Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.¹

Upaya pencegahan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegakan hukum (Polerstabes Makassar) di kota Makassar dilakukan 3 (tiga) cara:

¹Aiptu Lili Sugianto (49 Tahun), Bagian unit 3 satuan narkoba polrestabaes Makassar, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2018 di Polrestabes Makassar.

- a. Upaya pre-emptif, yaitu langkah berupa tindakan sosial engineering dan melakukan tindakan penyuluhan, mengawasi membentuk dan mendorong masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Upaya preventif, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Mengedepankan fungsi teknis shabara dengan melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol di lokasi yang diduga keras rawan penyalahgunaan narkoba, dan fungsi intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap suatu gejala gangguan kantibmas di tengah masyarakat serta kegiatan pembinaan masyarakat oleh bhayangkara polmas yang ditujukan untuk memberi dorongan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana dalam penyalahgunaan narkoba.

- c. Upaya Represif, yaitu suatu kegiatan pemedanaan yang ditujukan pada arah penangkapan terhadap semua kasus tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba yang sudah terjadi dengan teknis-teknis penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk penyidikan lebih lanjut.

Berkaitan pula dengan hal tersebut di atas Aiptu Lili selaku Kepala Satuan Unit 3 Narkoba Polrestabes Makassar di ruang kerjanya menjelaskan perihal pencegahan terhadap tindak pidana peredaran narkoba oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dilakukan dengan cara :

Yaitu dengan melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif yaitu melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus tindak pidana narkoba, seperti sosialisasi UU narkoba di sekolah-sekolah serta di desa/kelurahan daerah binaan dan sentuhan yang dilakukan oleh para Babinkamtibnas.²

Polisi mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas kasus kejahatan yang terkait dengan narkoba yang perlu didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Muhlis Bagian unit 3 satuan narkoba Polrestaes Makassar perihal pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba :

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. Untuk lebih memeperjelas bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban, karena korban tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri.³

Dengan demikian maka penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba.

Dalam menggunakan informan maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Susilo sebagai berikut :

1. Dalam memilih dan memelihara in forman seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan

²Aiptu Lili Sugianto (49 Tahun), Bagian unit 3 satuan narkoba Polrestaes Makassar, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2018 di Polrestaes Makassar.

³Aiptu Muhlis (46 Tahun), Bagian unit 3 satuan narkoba Polrestaes Makassar, wawancara, pada tanggal 17 Oktober 2018 di Polrestaes Makassar.

satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.

2. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup perkara seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seseorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan.
3. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi.

Pemberian hak istimewa bagi pelapor akan dapat memberikan manfaat untuk menjalin keseimbangan arus informasi mengenai kegiatan-kegiatan melanggar hukum kepada para petugas penegak hukum dan melindungi sumber informasi dari ancaman atau balas dendam. Setelah diketahuinya informasi penyidik merencanakan upaya-upaya selanjutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Aiptu Muhlis Bagian unit 3 satuan narkoba Polrestaes Makassar bahwa :

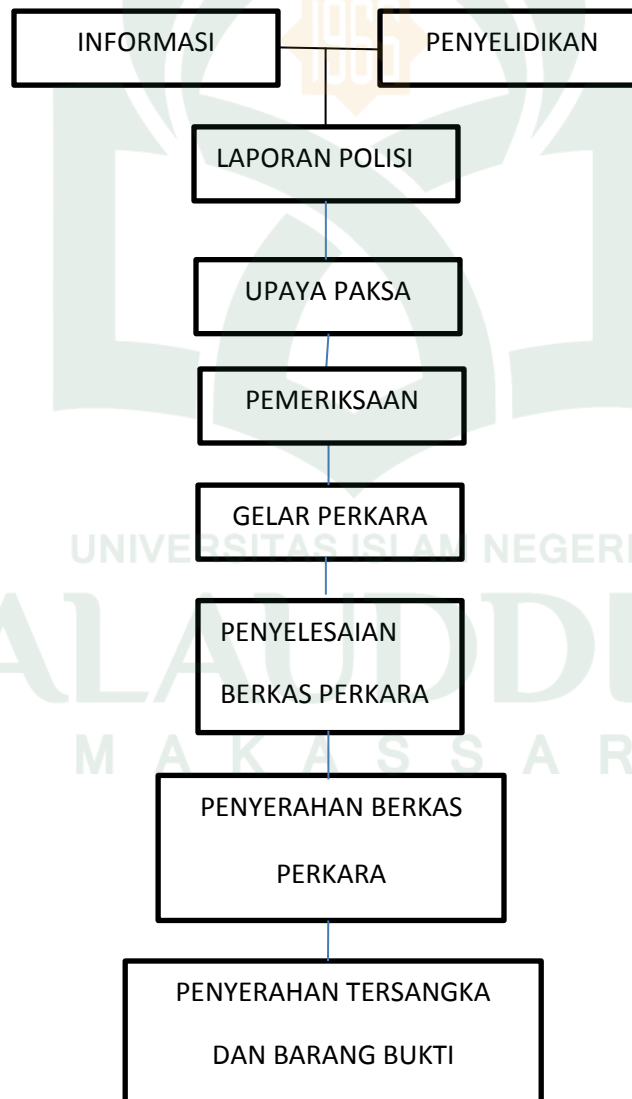
Bahwa upaya-upaya yang digunakan untuk mengetahui adanya tindak pidana narkoba adalah dalam kasus narkoba korban adalah pelaku sehingga pelaku tidak ada, oleh karena itu upaya yang ada dengan teknik yang ada kita berusaha untuk mencari mendeteksi, begitu mendapatkan informasi baru kita merencanakan bagaimana kita menangkap pelakunya yang kita sasarkan kepada pengedar. Hal ini memang sulit tetapi ada beberapa teknik penyelidikan mulai dari observasi (peninjauan) , pembuntutan, pembelian terselubung dan rencana pelaksanaan penggerbakan.⁴

⁴Aiptu Muhlis (46 Tahun), Bagian unit 3 satuan narkoba Polrestaes Makassar, wawancara, pada tanggal 17 Oktober 2018 di Polrestaes Makassar.

Dari apa yang dikemukakan Aiptu Joni Mamisa dapat diketahui 2 (dua) kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengungkapan tindak pidana narkoba yaitu :

1. Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang meliputi : peninjauan, pembuntutan, dan penyusupan.
2. Teknik yang bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba yang meliputi : pembelian terselubung dan pelaksanaan penggerebekan.

Bagan proses penyidikan tindak pidana narkoba, sebagai berikut :



Dari data yang diperoleh dari informasi maupun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dapat membuat Laporan Polisi sehubungan mengenai tindak pidana narkoba, korban adalah pelaku. Jadi tidak ada pelapor oleh karena itu pelapor biasanya adalah penyidik yang membuat laporan sendiri dalam artian jika pada saat penyidik melakukan penyelidikan tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba.

Stelah penyidik membuat Laporan Polisi Penyidik dapat melakukam upaya paksa terhadap tersangka sebagaimana dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 upaya paksa, meliputi :

a. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Penyidik yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Dalam hal tertangkap tangan tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas. Untuk kasus penyalahgunaan narkoba lama masa penangkapan terhadap tersangka berbeda dengan tindak pidana lain, untuk tindak pidana narkoba masa penangkapannya selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam jika belum cukup bukti, jika tindak pidana lain hanya 1x24 jam.

c. Penahanan

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau akan menghilangkan barang bukti. Penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Dari hasil wawancara dengan Aiptu Muhlis Bagian unit 3 satuan narkoba Polrestabes Makassar menjelaskan bagaimana proses penahanan terhadap tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba :

Bagi tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan bukti yang cukup maka akan ditahan dan masa tahanan yang dilakukan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari sesuai dengan pasal 24 ayat 1 KUHP, namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama 40 hari.⁵

d. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya, penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka, setelah penggeledahan dilakukan penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka, atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa.

Untuk proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

⁵Aiptu Muhlis (46 Tahun) Bagian Unit 3 Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, wawancara, pada tanggal 17 Oktober 2018 di Polrestabes Makassar.

yang tandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi menjadi jelas. Untuk tindak pidana narkoba ada perbedaan dengan pidana lainnya, dimana bagi tersangka yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba di periksa dengan pengambilan dan dibawah laboratorium forensik guna pemeriksaan untuk mengetahui apakah tersangka positif menggunakan narkoba atau sebaliknya. Setelah penyidik telah melakukan pemeriksaan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maka penyidik wajib menyelesaikan berkas perkara. Setelah dilakukan pemberkasan diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian. Penelitian meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik, setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyesegelan. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan jaksa penuntut umum yang menerima.

Tabel 1⁶

**Data Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2015 Di
Polrestabes Makassar**

No.	Bulan	Jumlah lap. Polisi	Jumlah tersangka	Jumlah/jenis BB
1.	Januari	15	20	Ecstasy 4.333, sabu-sabu 1.0194696 Gram.
2.	Februari	12	17	Ecstasy 1, sabu-sabu 381.967 Gram.
3.	Maret	12	12	Sabu-sabu 50 Gram.
4.	April	13	17	Sabu-sabu 25 Gram
5.	Mei	14	19	Ecstasy 20, sabu-sabu 1002.1063 Gram, Ganja 37 kecil.
6.	Juni	9	14	Sabu-sabu 19 kecil, ganja 6 kecil.
7.	Juli	5	5	Sabu-sabu 79 kecil dan 2 besar
8.	Agustus	14	23	Ecstasy 13 ½, sabu-sabu 97 kecil, dan 5 sedang, somadril 10.
9.	September	13	22	Ecstasy 6, sabu-sabu 20 kecil 0.00042.1 gram

⁶ Data diperoleh dari bagian Sat Narkoba Polrestbes Makassar pada 16 Oktober 2018

10.	Oktober	29	41	Ecstasy 54, sabu-sabu 61 kecil dan 12 sedang.
11.	Nopember	18	22	Ecstasy 9, sabu-sabu 52 kecil.
12.	Desember	15	22	Ecstasy 2, sabu-sabu 16 kecil dan 1 sedang.
		Jumlah :169	Jumlah :234	

Tabel 2⁷

**Data Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2016 Di
Polrestabes Makassar**

No.	Bulan	Jumlah lap. Polisi	Jumlah tersangka	Jumlah/jenis BB
1.	Januari	17	22	Ecstasy 1, sabu-sabu 59 kecil, 2sedang, 1 besar.
2.	Februari	35	45	Ecstasy 33 ¼ , sabu-sabu 95 paket kecil. Uang Rp 235.000, somadril 3.735, tramadol 1.183, thd 1.005.
3.	Maret	19	27	Sabu-sabu 83 paket kecil, 14 paket besar.
4.	April	40	53	Ecstasy 100, Sabu-sabu

⁷ Data diperoleh dari bagian Sat Narkoba Polrestbes Makassar pada 16 Oktober 2018

				128. paket kecil, 3 paket sedang, 1 paket besar, uang Rp. 30.000.
5.	Mei	21	28	Ecstasy 1, sabu-sabu 16 besar, 94 kecil, Ganja 1, tramadol 775, thd 498.
6.	Juni	19	27	Sabu-sabu 80 paket kecil.
7.	Juli	16	17	Sabu-sabu 62 paket kecil.
8.	Agustus	31	41	Sabu-sabu 1 paket sedang, 68 paket kecil.
9.	September	28	46	Ecstasy 6, sabu-sabu 8 paket besar, 58 paket kecil.
10.	Oktober	30	37	Ecstasy 210, sabu-sabu 111 paket kecil.
11.	Nopember	36	45	Ecstasy 0.50, sabu-sabu 100 sachet kecil.
12.	Desember	32	44	sabu-sabu 120 paket kecil.
		Jumlah :324	Jumlah : 432	

Tabel 3⁸

**Data Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2017 Di
Polrestabes Makassar**

No	Bulan	Jumlah Lap. Polisi	Jumlah Tersangka
1.	Januari	40	46
2.	Februari	52	73
3.	Maret	52	79
4.	April	32	43
5.	Mei	36	49
6.	Juni	19	28
7.	Juli	33	47
8.	Agustus	26	37
9.	September	26	39
10.	Oktober	35	57
11.	November	38	55
12.	Desember	27	44
		Jumlah : 416	Jumlah : 597

⁸ Data diperoleh dari bagian Sat Narkoba Polrestabes Makassar pada 16 Oktober 2018

Tabel 4⁹

**Data Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2017 Di
Polrestabes Makassar**

No.	Tahun	Jumlah kasus	Kasus selesai	Jumlah tersangka
1.	2015	169	158	221
2.	2016	324	290	385
3.	2017	416	362	597
		Jumlah : 909	Jumlah : 810	Jumlah :1203

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Makassar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terlihat mengalami peningkatan yang drastis, yang mana dari tahun 2015 jumlah kasus penyalahguna tindak pidana narkotika berjumlah 169 dengan tersangka 221 orang dan jumlah kasus yang selesai 158. Di tahun 2016 meningkat menjadi menjadi 324 kasus dengan jumlah tersangka 385 orang dan di tahun 2017 mengalami lagi peningkatan menjadi 416 kasus dengan jumlah tersangka 597.

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

⁹ Data diperoleh dari bagian Sat Narkoba Polrestbes Makassar pada 16 Oktober 2018

C. Faktor-faktor Yang Menghambat Penyidik Dalam Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Kota Makassar

Dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana khususnya tindak pidana Narkotika terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan Profesionalisme dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di kota Makassar sebagaimana hasil wawancara dengan Aiptu lili selaku Kepala Satuan Unit 3 Narkoba Polrestabes Makassar perihal faktor-faktor yang menjadi hambatan penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Kota Makassar :

Masyarakat takut melaporkan mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di wilayahnya karena takut berurusan dengan aparat kepolisian, takut mendapat ancaman dari oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana narkotika. Fasilitas yang mendukung dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih kurang seperti Laboratorium Forensik Narkoba yang saat ini hanya ada Polda Sulsel sehingga proses penyidikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika membutuhkan waktu dan biaya. Jumlah anggota Satuan Narkoba sangat terbatas atau tidak seimbang dengan jumlah penduduk di wilayah kota Makassar, karena banyak penyelidikan tindak pidana narkotika yang tertunda yang di laporkan masyarakat ke anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, sehingga masyarakat menilai lambannya kinerja Penyidik pada Polrestabes Makassar.¹⁰

Di dalam penyidikan mempunyai kendala dalam peredaran tindak pidana narkotika yaitu dengan yaitu dengan teknik baru peredaran narkotika. Teknik baru ini ialah peredaran narkotika dengan cara mengirim narkotika dengan paket melalui jasa travel, paket titipan kilat, dan paket kereta api. Di mana paket-paket tersebut terbungkus dengan rapi dan tidak mencurigakan apabila isinya merupakan narkotika. Adapun kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika .

¹⁰ Aiptu Lili (49 Tahun), Bagian unit 3 satuan narkoba polrestabes Makassar, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2018 di Polrestabes Makassar.

a. Kurangnya anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal.

b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah satu kendala karena penyidik tidak dapat membuka satu persatu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait.

c. Kurangnya personil penyidik narkotika

Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia.

d. Putusan pengadilan yang ringan

Ringannya putusan pengadilan juga menjadi kendala Polri dalam mengungkap teknik baru tindak pidana narkotika. Karena putusan yang ringan tersebut, para pelaku yang sudah candu oleh narkoba tidak jera untuk mengulangi kesalahannya kembali untuk memakai serta mengedarkan narkoba.

e. Saling terikatnya tiap pelaku

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polri. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.

f. Teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah

Teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami penyidik. Para pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.¹¹

Bripka Adi Jaya Ba sub bagian Hukum menambahkan bahwa :

Penggunaan narkotika didaerah Makassar mash ternilai menjadi pengguna tertinggi disebabkan karena beberapa kondisi diantaranya, masyarakat masih enggan dalam menerima informasi berupa edukasi bahaya narkotika, penyebaran begitu massif dan kondisi finance dimana perdagangan narkotika memberikan keuntungan yang lebih bagi para penyebar narkotika.¹²

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika

Menurut Yusuf Qaradhawi, ganja dan heroin serta bentuk lainnnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama.¹³ Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang

¹¹LA Lucas, *Kendal Penyidik Dalam Mengungkap Teknik Peredaran Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum, (Oktober 2004): h. 7

¹²Bripka Adi Jaya (31 Tahun), Ba sub bagian hukum, *wawancara*, pada tanggal 17 Oktober 2018 di Polrestabes Makassar.

¹³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2.(Jakarta: Gema Press, 1995)H. 792

membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamr saja. Seperti disebutkan dalam Surat al-Ma'idah ayat:05/90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁴

Narkotika di qiyaskan khamr karena mempunyai kesamaan illat yakni memabukkan. Qiyas menurut Ibnu Subki yaitu menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumannya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).¹⁵

Setelah menjelaskan persoalan makanan, kini disinggung-Nya soal minuman yang terlarang yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dan segala yang memabukkan walau sedikit, dan br-judi, berkorban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, karena itu jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 219, penulis telah kemukakan makna khamr dan perseliisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanafiah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h. 123

¹⁵Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172

haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buah yang berpotensi memabukkan atau menandung alkohol yang berpotensi memabukkan, ia dalam pandangan Abu Hanafiah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apa pun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak. Ini berdasarkan sabda Rasul saw.: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram” (HR. Muslim dari Ibn ‘Umar). Juga berdasarkan sabda Nabi saw.: “Segala yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak maka kadarnya yang sedikit pun haram” (HR Ibn Majah melalui Jabir Ibn Abdillah).¹⁶

Mayoritas ulama memahami bahwa pengharaman khamr dan penamaannya sebagai *rijs/keji* serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis. Memang, kata ini digunakan juga oleh bahasa Arab dalam arti sesuatu yang kotor dan najis.

Thahir Ibn Asyur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamr adalah menjauhinya dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya menjauhi berhala dari segipenyembelihan atas namanya. menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib. Tidak termasuk dalam perintah menjauhinya, menjauhi sehingga tidak memegangnya atau tidak

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), h.235-236

menunjukkan kepada manusia agar menjadi pelajaran menyangkut keberadaannya, atau menunjukkan fotonya dan memeliharanya di museum-museum sebagai peninggalan sejarah. Tidak juga menjauhi khamr dalam rangka membuatnya sebagai cuka dan sebagainya.¹⁷

Adapun hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahayanya khamar sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.¹⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata: telah menceritakan Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat.

Di dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan tentang hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁹ *Jarimah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarimah qisas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah qisas*.²⁰

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), h. 236-237

¹⁸Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Tras al-'Arabi, t.th), h. 1587.

¹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997),h. 1

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000). H.125.

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²¹

Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kaffarat karena sanksi tidak ditentukan langsung oleh al-Qur'an dan hadist, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.²²

Adapun hukuman bagi pengguna *mukhaddirat* (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangya harus dijatuhi hukuman *ta'zir* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun pelaksanaan jarimah *ta'zir* dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan jarimah *ta'zir*, yaitu prinsip utama yang menjadi acuan penguasa dan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadharatan* (bahaya). Menurut para *fuqoha'* bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.²³

Mengingat bahwa pembangunan dalam kesehatan merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan, diantaranya adalah dalam penyelenggaraan

²¹Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), h. 19.

²²M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139.

²³Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, h. 797.

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Narkotika yang merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dalam hukum Islam sendiri sudah menjelaskan bahwa narkotika merupakan hal yang diharamkan karena saat mengkonsumsinya mempunyai efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat.

1. Membius (menurunkan kesadaran)
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas)
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence)
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).²⁴

Berdasarkan hukum Islam narkotika haram untuk dikonsumsi. Bahkan bagi pengguna narkotika dikenakan hukuman ta'zir. Melihat Ketentuan pada Pasal 7 yang menjelaskan narkotika bisa digunakan untuk kesehatan. Adapun pelaksanaan hukuman dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan hukuman, yaitu prinsip utama yang menjadi dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Menurut para fuqoha' bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dalam hukum Islam diperbolehkan apabila tidak ada atau tidak ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Berdasarkan sebuah kaidah asasi berkenaan dengan keharusan menghilangkan kemadharatan demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu:²⁵

²⁴Suwandi. *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, (El-Qisth, No. 2, Vol. 1 2005) h. 792.

²⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.3.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dalam fikih jinayah, kaidah asasi tersebut di antaranya berkenaan dengan kebolehan melakukan jarimah karena ada alasan-alasan syara' yang dibenarkan. Kebolehan tersebut dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai kelanjutan dari kaidah asasi diatas yang menyatakan bahwa kemadharatan harus dihilangkan, maka ketika seseorang bertemu dengan keadaan yang menyulitkan dirinya atau orang lain, ia dibolehkan melakukan hal-hal terlarang untuk menghilangkan kemadharatan tersebut, termasuk boleh berbuat jarimah sesuai dengan kaidah.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kemadharatan membolehkan (seseorang melakukan) hal-hal yang terlarang²⁶ Kemadharatan atau keadaan darurat adalah kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan baik secara menyakinkan atau dugaan. Kemadharatan ini bisa ditimbulkan dari dalam dan bisa juga dari luar. Kemadharatan yang bisa menyebabkan kematian. Sedangkan kemadharatan yang ditimbulkan dari luar berupa paksaan dari oranglain yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan.

Ada beberapa pengertian tentang paksaan, diantaranya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang (pemaksa) terhadap orang yang dipaksa sehingga menimbulkan pada diri yang dipaksa hilang kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Paksaan terbagi menjadi dua, yaitu paksaan absolut (*ikrah tam* atau

²⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajis fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h.227.

mulji’) dan paksaan relative (*ikrah ghayr tam atau ghayr mulji*’). Paksaan absolut adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan pilihan karena ada ancaman yang membahayakan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Sedangkan paksaan relative adalah paksaan yang menghilangkan pilihan karena ancamannya tidak sampai menghilangkan jiwa seperti diikat atau dipenjarakan.²⁷

Mengingat bahwa tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur’an dan hadist, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁸

Di dalam al-Qur’an dan hadis narkoba tidak disebutkan namun, hanya menyebutkan khamar yang illatnya sama yakni sama-sama memabukkan yang menghilangkan kesadaran. Narkoba berpengaruh terhadap akal dan fisik, maka sanksi hukumannya di kategorikan khamar yang secara tegas di larang oleh Allah swt.

²⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, h. 87.

²⁸ Djamil Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah penyelesaian penyidikan oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidik tindak pidana narkoba di kota Makassar adalah proses nya sama dengan tindak pidana lainnya namun yang membedakan ialah dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba penyidikan pada tindak pidana biasanya dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat di lakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan para penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba adalah :
 - a. Masyarakat takut melaporkan mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya karena takut berurusan dengan aparat kepolisian;
 - b. takut mendapat ancaman dari oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana narkoba;
 - c. Kurangnya fasilitas yang mendukung dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba.
3. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkoba pengguna adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagang nya harus dijatuhi

hukuman ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati.

B. *Implikasi Penelitian*

Pihak Kepolisian hendaknya :

1. Meningkatkan kinerja kepolisian khususnya dalam mengungkapkan dan memberantas tindak pidana narkoba di Kota Makassar.
2. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan RT dan RW setempat juga ke sekolah sekolah dimulai dari bangku Sekolah Dasar hingga ke perguruan tinggi, juga Pemerintah harus menambah fasilitas ke tiap Polsek agar penanganan Narkoba cepat dilaksanakan. Serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan tindak pidana narkoba.
3. Memberlakukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan hukum Had (dicambuk).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Melton Putra, 1992.
- Ad-Dimasyqi. Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Bawengan Gerson. *Penyidikan Perkara pidana*. Jakarta: Paradnya Paramita, 2002.
- , *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Bea, Biro dan Cukai Amerika Serikat (*National Indertification Manual*). 06 Januari 2018.
- Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: SinarGrafika, 2011.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Ba; lebat Dedikasi Prima, 2016.
- Suwandi. *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, El-Qisth, No. 2, Vol. 1 2005.
- Hakim Rahma., *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Pers, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Cet. 3; Jakarta: Amzah, 2015
- , M. Nurul. *Fiqh Jinayat, Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- , *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jaihi Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku*, Jakarta: Polri, 2001.
- al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz III Beirut: Dar Ihya' al-Tras al-'Arabi, t.th.
- Parthodiharo, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Prayudi, Aqmal. *Analisis Yuridis Perihal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)*, Skripsi Kota Makassar. Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2014.
- al-Qaradhwai, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2. Jakarta: Gema Press, 1995.
- Renggono Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Ba;lebat Dedikasi Prima, 2016.
- Saifullah, Acep. *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan* (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2013) 06 Januari 2018
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Seni-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sungguh, As'ad. *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Kurnia Esa, 1995.
- Surodibroto, Sunarto *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2011
- Syihab, Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Cet.I;Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. al-Zuhayli, Wahbah. *al-Wajis fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus Dar al-fikr, 2003

Website :

- Abdillah Anas, Hidayah sunnah, Hukum Narkoba.
<http://anacilacap.blogspot.com/2014/08/hukum-narkoba.html>
 17 Agustus 2014) (Diakses
- Basri Hasan. *TribunTimur, Pemakai Narkoba di Makassar didominasi kalangan remaja BNN minta lapor sebelum ditangkap*
<https://Makassar.tribunnews.com/2017/02/12/pemakai-narkoba-di-makassar-didominasi-kalangan-remaja-bnn-minta-segera-lapor-sebelum-ditangkap>. (Diakses 12 februari 2017).

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaraan, Edisi kedelapan. Yogyakarta: Indonesia tera, 2011.

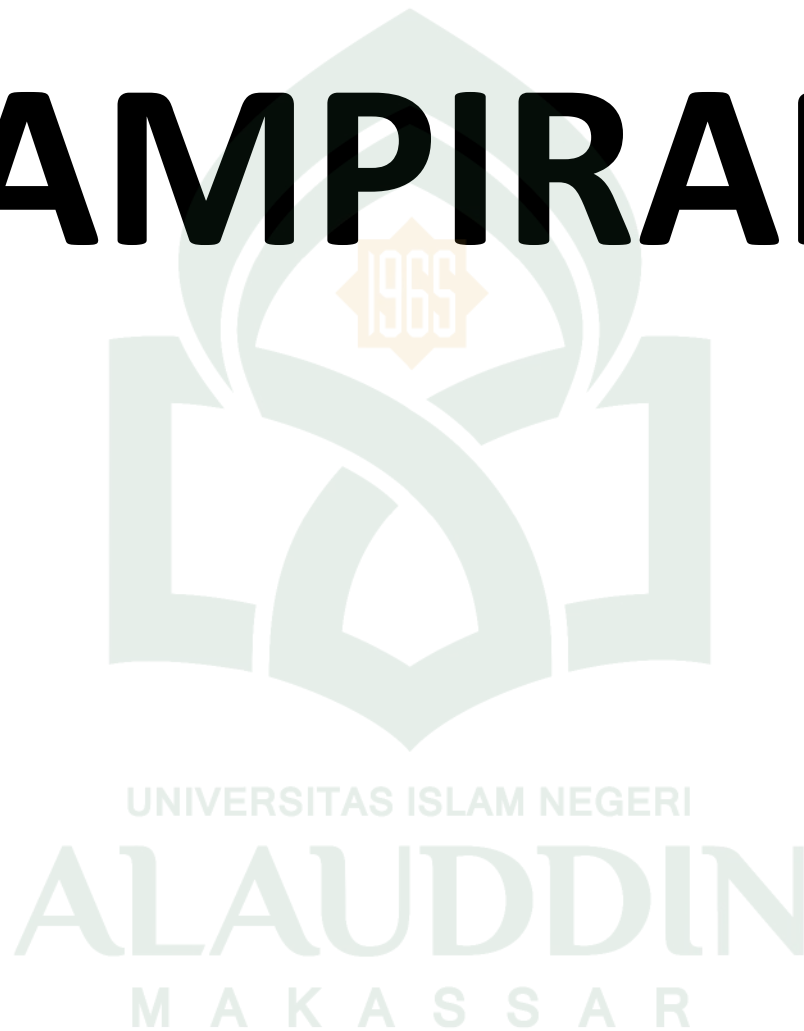
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Nama Peneliti : Irfan
Profesi : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan/Syariah dan Hukum
Semester : IX (Sembilan)
4. Nama Informan : Bripka Adi Jaya
Profesi : Polisi
Lembaga/Kantor : Polrestabes Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 9 Oktober s/d 9 November 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Makassar,

Informan



Bripka Adi Jaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Peneliti



Irfan

NIM: 10200114015

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Peneliti : Irfan
Profesi : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan/Syariah dan Hukum
Semester : IX (Sembilan)
2. Nama Informan : Aiptu Lili Sugianto
Profesi : Polisi
Lembaga/Kantor : Polrestaes Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 9 Oktober s/d 9 November 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Informan


Aiptu Lili Sugianto

Makassar,

Peneliti


Irfan

NIM: 10200114015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

5. Nama Peneliti : Irfan
- Profesi : Mahasiswa
- Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan/Syariahi dan Hukum
- Semester : IX (Sembilan)
6. Nama Informan : ASRIANTO
- Profesi : POLISI
- Lembaga/Kantor : POLRESTABES MAKASSAR


Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 9 Oktober s/d 9 November 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Makassar,

Informan


ASRIANTO

Peneliti


Irfan
NIM: 10200114015

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Peneliti : Irfan
Profesi : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana dan Kertanegara/Syariah dan Hukum
Semester : IX (Sembilan)
2. Nama Informan : Aiptu Muhlis
Profesi : Polisi
Lembaga/Kantor : Polrestaes Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 9 Oktober s/d 9 Nopember 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Makassar, 15 Oktober 2018

Informan



Aiptu Muhlis

Peneliti



Irfan

NIM: 10200114015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar. 1 Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara dan Pengambilan Data

Penils Dengan :

Nama : Aipti Lili Sugianto

Tanggal : 16 Oktober 2018

Tempat : Polrestabes Makassar



Gambar 1.3

Gambar. 2 Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara dan Pengambilan Data
Penils Dengan :

Nama : Aipti Muhlis

Tanggal : 17 Oktober 2018

Tempat : Polrestabes Makassar



Gambar. 3 Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara dan Pengambilan Data

Penils Dengan :

Nama : Bripka Adi Jaya

Tanggal : 17 Oktober 2018

Tempat : Polrestabes Makassar



Gambar. 4 Bukti Dokumentasi Hasil Pengambilan Data Penils Dengan :

Nama : Asrianto

Tanggal : 15 Oktober 2018

Tempat : Polrestabes Makassar



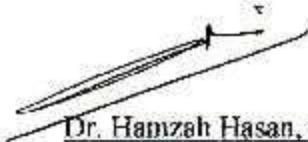
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Irfan NIM: 10200114015**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penyidikan Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Makassar)*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Hamzah Hasan, M.H.I
Nip. 19631231 1993 02 1003

Pembimbing II



Dra. Hj. Malimah B. M.Ag
Nip. 19581025 199603 2 001

Penguji I



Dr. Kurniati, M.H.I
Nip. 19740627 200604 2 002

Penguji II



Ashar Similele, S.H. M.H.
Nip. 19690717 201411 1 001

Nomor: B- 3277/SH.01/PP.00.9/10/2018

Samata, 9 Oktober 2018

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Bapak KAPOLRESTABES MAKASSAR

di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Irfan
Nim : 10200114015
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Tidung Mariolo Kota Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

"Tinjauan Yuridis Penyelesaian Penyidikan oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika Perseptif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Makassar)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hamzah Hasan, M. H. I
2. Dr. Hj. Halimah B, M. Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Polrestabes Makassar terhitung mulai tanggal 9 Oktober s/d 9 November 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;

2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 113 / X / 2018 / Subbagkum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B.3277/SH.01/PP.00.9/10/2018, tanggal 9 Oktober 2018. Perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : IRFAN
NIM : 10200114015
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Muh Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

" TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR) "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Oktober 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGUSUBDA POLRESTABES MAKASSAR



Up
KAUF BANKUM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Mks.

AFRYAN FIRMAN, S.E., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83040243

RIWAYAT HIDUP



Irfan, lahir pada tanggal 22 Juli 1996 tepatnya hari senin di Desa Gareccing Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Anak ke-dua dari tiga bersaudara ini merupakan buah hati dari ayahanda Suddin dan Ibu Sufiati. Penulis memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2002 di SDN 248 Gareccing, kemudian menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tonra dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Tonra dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2014. Melalui jalur SNMPTN pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Pengalaman organisasi Penulis anggota dari Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) di Fakultas Syariah dan Hukum.